

**ANALISIS EFEKTIFITAS, AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KOTA PADANG**

**TESIS**

**Oleh :**

**ERWANTOSI  
07206079**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2010**

# **ANALISIS EFEKTIFITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA PADANG**

**Oleh : Erwantosi**

*Dibawah bimbingan : Dr. Hefrizal Handra, M.Soc, Sc dan Suhandra, SE, M.Si, Ak*

## **Abstraks**

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk pendanaan pendidikan yang signifikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam pembiayaan pendidikan, pemerataan dan perluasan akses serta untuk peningkatan mutu pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen dan observasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah menengah pertama di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan BOS belum efektif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada sekolah menengah pertama. Pemberian prioritas yang memadai kepada siswa miskin belum tercapai. Penggunaan dana BOS sebagian besar hanya terserap untuk pembayaran honorarium guru dan pegawai. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS masih sangat lemah dan belum memadai, hal ini disebabkan dalam penggunaan dana BOS tidak banyak melibatkan guru dan komite sekolah sebagai alat kontrol dalam perencanaan maupun dalam penggunaan dana. Mekanisme yang menjamin pengelolaan dilaksanakan secara transparan belum tersedia secara memadai, sehingga mengurangi tingkat akuntabilitas pengelolaan program BOS.

**Kata Kunci : Efektifitas, Akuntabilitas dan Transparansi**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ). Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah, yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), disamping itu juga harus berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya (Djalal dan Supriadi, 2001).

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Setiawan (2009), menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS yaitu, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Pertama, efisien maksudnya adalah dana yang telah didapatkan oleh sekolah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Artinya bantuan tersebut jangan sampai salah penggunaan dan tepat sasaran. Kedua, efektifitas maksudnya adalah kelanjutan dari efisien diatas, artinya

efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, transparansi. Transparansi ini sangat penting, karena jika dari pihak sekolah kurang adanya transparansi maka dari pihak wali murid juga akan melakukan protes kepada sekolah. Dan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak sekolah. Keempat, akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika keempat hal yang telah dijelaskan diatas dilakukan dengan baik, maka bantuan BOS dalam penyalurannya akan tepat sasaran. Dan bantuan ini akan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu/miskin.

Namun walau telah lima tahun bergulir sejak diluncurkannya Program BOS pada bulan Juli 2005, BOS belum mampu memenuhi harapan masyarakat menikmati pendidikan dasar gratis, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. Padahal dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah.

Sosialisasi dana BOS ini belum dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan orang tua tentang BOS. Kurangnya informasi ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat ditutup dari BOS. Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah tidak mengikutsertakan wali murid dan tidak dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang tidak mengetahui BOS maupun penggunaannya. Pada tingkat SD ataupun SMP dan sederajat, pungutan sebelum serta sesudah ada dana BOS tetap marak. Padahal,

logikanya, tambahan anggaran paling tidak dapat membuat biaya penyelenggaraan sekolah lebih murah. (Wiguna, 2008)

Permasalahan lain yang sering muncul pada setiap satuan pendidikan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, antara lain sekolah tetap menarik iuran bagi siswa miskin, penggelembungan APBS, proses belajar mengajar tetap kurang efektif sampai dengan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut. Kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS, ketidak fahaman orang tua murid tentang dana BOS. Dampak lain yang dapat terjadi adalah penyelenggaraan sekolah yang tidak sehat, proses belajar mengajar kurang optimal, dan pada akhirnya mutu pendidikan akan terus menurun.

Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menggambarkan sejak program BOS diluncurkan tahun 2005, pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. Berdasarkan laporan ICW tentang dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2004-2009 diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp 243 miliar (Suara Pembaruan, September 2009)

Dari beberapa temuan terhadap kasus dan permasalahan yang terjadi diatas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat Sekolah belum berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya serta

pengelolaannya belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari prinsip dasar untuk mewujudkan good governance.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai salah satu sekolah yang menjadi sasaran pemberian dana BOS, sudah tentu dituntut untuk melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien, dalam hal penggunaan dana harus transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pengelolaan program BOS di SMP tersebut harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan khususnya masyarakat miskin, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hal ini mengingat bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP dan sederajat.

Berdasarkan latar latar belakang permasalahan diatas maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengungkap secara mendalam tentang bagaimana efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa masalah yang perlu mendapat kajian lebih mendalam untuk segera mendapat tindak lanjut yang relevan antara lain adalah :

- a. Bagaimana efektifitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.
- b. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada pengkajian terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang difokuskan pada :

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat (APBN) melalui Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diteliti disini adalah dana BOS yang diberikan pada tahun anggaran 2009, yang meliputi periode Januari sampai dengan Desember 2009 (semester 2 Tahun Ajaran 2008/2009 dan semester 1 Tahun Ajaran 2009/2010).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektifitas pengelolaan dana BOS serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS tersebut pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Padang. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan :

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.
2. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam

pengembangan khasanah ilmu pengetahuan terutama terkait dengan ilmu akuntansi pemerintahan, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan masalah efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar, baik pada tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi pihak terkait berikut:

- a. Pembuat kebijakan terhadap penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di kota Padang.
- b. Kepala sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan tujuan dan sasarannya .
- c. Tim manajemen BOS kota Padang dan Propinsi Sumatera Barat tentang dampak pemberian dana BOS, guna keperluan strategi ke depan dalam penyelenggaraan dana Bantuan pendidikan serupa.
- d. Pemangku kepentingan (*stake holders*) di bidang pendidikan dalam menetapkan standar pembiayaan sekolah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

**Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut.**

1. Pengelolaan program BOS pada sekolah menengah pertama di Kota Padang belum efektif, hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran program BOS untuk perluasan dan pemerataan akses pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sasaran BOS untuk memberikan prioritas yang memadai kepada siswa miskin juga belum tercapai. Hal ini disebabkan penggunaan dana BOS lebih banyak terserap untuk pembayaran honor guru dan pegawai, sehingga kontribusi dana BOS untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin sangat kecil dan tidak memadai.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan baik, indikasi ini terutama terlihat antara lain, dalam penyusunan RAPBS dan penggunaan dana, Kepala Sekolah tidak melibatkan guru dan komite sekolah sebagai alat kontrol dalam perencanaan penggunaan dana BOS, penggunaan dana tidak selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentuan 13 jenis penggunaan dana yang terdapat dalam juklak program, Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan tepat waktu dan belum sesuai dengan juklak yang telah ditentukan.
3. Tranparansi dalam pengelolaan dana BOS terlihat masih sangat lemah. Kelemahan ini terlihat dari beberapa hal antara lain, pelaksanaan sosialisasi

program BOS kepada orang tua siswa cenderung sekedar formalitas. Kebijakan pengelolaan program dan penggunaan dana belum diumumkan secara keseluruhan. Di semua sekolah tidak tersedia sarana untuk pengaduan dan penanganan masalah pengaduan secara memadai, sehingga masyarakat kesulitan untuk menyampaikan permasalahan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.

4. Dengan mekanisme program BOS yang berjalan sekarang terlihat bahwa sistem kontrol yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Dalam pengelolaan program seperti ini, Satker Kabupaten/Kota pada prinsipnya hanya bertanggungjawab kepada Satker Propinsi, dan selanjutnya kepada Satker Pusat atau Depdiknas, sehingga sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD bisa tidak mengetahui tentang keberadaan dan perkembangan program. Padahal urusan pendidikan sudah menjadi salah satu kewenangan wajib daerah. Kurangnya koordinasi dan informasi ke Pemda mengenai besarnya dana dan pemanfaatan Program BOS, sehingga sulit bagi Pemda untuk menyusun atau menyesuaikan program pendidikan yang akan dibiayai Pemda agar lebih efektif.

## **5.2. Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penargetan dan pengaturan alokasi dana, khususnya untuk bantuan siswa miskin dan setiap jenis pos pengeluaran, sehingga penggunaan dana BOS lebih diprioritaskan untuk pemberian manfaat bagi siswa miskin. Di samping itu perlu adanya aturan umum proses penentuan siswa miskin.

2. Ketentuan mengenai 13 jenis penggunaan dana perlu ditinjau kembali supaya lebih fleksibel dan lebih mampu mengakomodasikan program sekolah yang tertuang dalam RAPBS. Perlu juga diberikan fleksibilitas agar penggunaannya bisa didasarkan pada kesepakatan daerah sehingga bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan keberadaan dan pos penggunaan sumber dana lain, termasuk sumber dana dari APBD.
3. Untuk memastikan bahwa penyusunan RAPBS melibatkan semua stakeholder di tingkat sekolah (guru, komite, orang tua siswa) maka RAPBS harus dilampiri notulen rapat dan daftar hadir orang tua siswa.
4. Sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi yang menjamin akuntabilitas publik yang lebih luas perlu lebih ditingkatkan. Frekuensi pelaporan dari sekolah sebaiknya cukup dilakukan setiap semester supaya tidak membebani sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar.
5. Untuk lebih meningkatkan mekanisme kontrol terhadap pengelolaan program BOS yang dilaksanakan oleh berbagai tingkat pengelola, maka perlu dipikirkan dan disiapkan pengalihan mekanisme pengelolaan dari dekonsentrasi menjadi dana alokasi khusus (DAK), sehingga program dapat dikelola oleh daerah. Dengan demikian daerah akan mempunyai kewenangan untuk menentukan sasaran program agar lebih efektif dan pertanggungjawaban akan lebih jelas serta pengawasan dan pengendalian akan dapat ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan memungkinkan untuk dilakukan pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada empat Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang dan pengelolaan dana BOS yang diteliti terbatas pada dana BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2009, sehingga hasil temuan ini kurang dapat diberlakukan atau digeneralisasikan pada sekolah yang sama di Kota Padang. Namun demikian diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan penelitian mendatang dapat menambah sampel penelitian terhadap sekolah penerima dana BOS seperti SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Padang atau seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat dengan periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif tentang efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di jenjang pendidikan dasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, Marita, (2008), *Mekanisme Akuntabilitas LOD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Spirit Publik Vol. 4, No. 2, Oktober 2008 Hal. 169 – 184
- Arianto, Alang, (2008), *Aspek Keadilan Program Bantuan Operasional Sekolah Bagi Keluarga Miskin*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (2000), *Prosedur Penelitian*, Jakarta; Rineke Cipta
- Asian Development Bank, (1999), *Governance : Sound Development Management*, (<http://www.tempointeraktif.com>)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002) *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah* .
- Budiardjo, Miriam, (2000), *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : Mizan.
- Bungin, Burhan Hm.(2008), *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.
- Choiri, Nur hidayatul, (2006). *Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Studi Kasus tentang Akuntabilitas Administratif Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang*, (<http://www.tempointeraktif.com>)
- Departemen Pendidikan Nasional, (2009), *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka wajib belajar 9 tahun, 2009*.
- Terry, George,R (200), *Prinsip-Prinsip Manajemen*, alih bahasa oleh J.Smith. D.F.M, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hamadah, Zulfiah, (2009), *Sumber-Sumber, Efisiensi dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan*, (<http://www.manajemenpendidikan.com>)
- Handayaniingrat, Soewarno, (1986), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Harfa, Fahmi, (2006), *Evaluasi Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah-Sekolah di Kota Bandar Lampung Tahun 2005*, (<http://www.tempointeraktif.com>)
- Jackson, P.M. (1982). *The Political Economy of Bureaucrazy*. Oxford : Philip Allan Publishers Limited.
- Jalal Fasli & Supriadi Dedi. (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi*

- Daerah, Yogyakarta: Adi Cita
- Krina P, Loina Lalolo,(2003),Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, (2003), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, (2006). “Mewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.”*Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1, Mei 2006. Hal 1 – 17.
- Moleong, Lexy, J, (2005), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya.
- Natawijaya, Rachman. (1999). Psikologi Umum dan Sosial. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Parwita, Diah Desi. (2008). “*Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri di Kabupaten Bayumas*” Tesis Pogram Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Prihantoro, FX Triyas Hadi, (2009), *Kolaborasi Menyelamatkan Dana BOS, Suara Pembaruan September 2009*, (<http://www.suarapembaruan.com>)
- Rijal, Asep, (2009), *Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Garut*, Skripsi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut.
- Ruswati, (2005), Efektivitas Pelayanan Publik : *Pengaruh Disiplin Dan Iklim Kerja TerhadapEfektivitas Pelayanan Aparat Pemerintah Kelurahan Di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap*, (<http://www.suarapembaruan.com>)
- Sadjiarto,Arja, (2000) “*Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150 Universitas Kristen Petra ( <http://puslit.petra.ac.id/journals>)
- Santoso, Dwi, (2007), *Keefektivan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Di SD se-Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*, Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Setiawan,Tomy, (2009), *Ajari Sekolah Soal Transparansi*, Harian Jogja, 1 septembert 2009, (<http://www.suarapembaruan.com>)

- Wiguna, (2008), “*ICW Temukan Penyimpangan BOS*”, Tempo Interaktif, 28 Oktober 2008, (<http://www.tempointeraktif.com>)
- \_\_\_\_\_, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- \_\_\_\_\_, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, 2008, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- \_\_\_\_\_, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- \_\_\_\_\_, 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
- \_\_\_\_\_, 2004, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/a/U/2004 tentang *Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan*.